

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bapedalda Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban untuk menyampaikan pencapaian kerjanya secara akuntabel, baik keberhasilan ataupun kegagalan, yang dituangkan ke dalam LAKIP Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015. Laporan ini menyajikan setiap pencapaian kinerja yang dijabarkan ke dalam 5 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). LAKIP Bapedalda Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat memberikan gambaran setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menjadi acuan dalam mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam implementasi Renstra 2010 – 2015 untuk kemudian dipertimbangkan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan analisa pencapaian kinerja pada tahun 2015, secara keseluruhan pencapaian kinerja Bapedalda pada Tahun 2015 berhasil dicapai dengan persentase capaian sebesar 113,51%, dengan realisasi anggaran sebesar 93,83%.

Pencapaian kinerja sektor lingkungan hidup menunjukkan tren perkembangan yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana tercermin pada beberapa indikator kinerja utama yang belum tercapai sesuai target, antara lain implementasi perizinan lingkungan yang belum maksimal oleh pelaku usaha/industri/kegiatan serta peningkatan peranserta stakeholders dalam program Adipura yang masih perlu ditingkatkan.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain adalah dengan:

- 1) Kegiatan-kegiatan dalam lingkup evaluasi penyelenggaraan Amdal yang ditujukan terhadap Komisi Penilai Amdal (KPA) kabupaten/kota tetap perlu dilakukan ke depan secara berkesinambungan, tidak hanya melalui pertemuan/peninjauan langsung ke KPA kabupaten/kota yang bersangkutan, tetapi juga diupayakan melalui koordinasi tidak langsung yang dilakukan secara intens dengan aparat instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, terutama terkait dengan perkembangan penyelenggaraan Amdal dan permasalahan yang dihadapi di lapangan.
- 2) Perlunya diberikan sosialisasi kepada KPA kabupaten/kota terkait peraturan perundangan-undangan terbaru yang dikeluarkan di bidang Amdal, terutama yang muatannya berkaitan dengan penyelenggaraan Amdal.

- 3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS oleh provinsi ke depannya agar dapat dilakukan pada beberapa kabupaten/kota yang belum mendapatkan pembinaan sebelumnya terkait pelaksanaan KLHS.
- 4) Kegiatan pembinaan KLHS agar tidak hanya difokuskan pada pelaksanaan KLHS untuk RPJPD/RPJMD saja, tetapi juga terhadap dokumen perencanaan lainnya, seperti RTRW, RDTR/RTR dan Renstra (bila memungkinkan juga dilakukan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program yang berisiko terhadap lingkungan hidup).
- 5) Diperlukan koordinasi yang lebih intens antara provinsi dan kabupaten/kota, serta antara instansi/SKPD terkait di provinsi dan masing-masing kabupaten/kota dalam pelaksanaan KLHS. Bila memungkinkan, provinsi dapat memfasilitasi pertemuan dengan kabupaten/kota guna penyamaan persepsi mengenai pelaksanaan KLHS, atau pun dalam rangka sosialisasi jika ada aturan/regulasi baru yang diterbitkan terkait dengan pelaksanaan KLHS.
- 6) Peningkatan pengawasan fungsi Kab/Kota untuk melakukan pembinaan kepada objek/kegiatan dan memberikan kemudahan dalam pengurusan IPLC sesuai dengan kewenangannya
- 7) Perlu mekanisme yang mengatur tindak lanjut objek yang sudah mendapat peringkat merah berturut turut, apakah akan tetap menjadi objek atau penegakan hukum
- 8) Perlu menambah budget dan cakupan pengawasan dengan memberikan bimbingan teknis baik dari Kabupaten/Kota ataupun dari Provinsi untuk perusahaan yang kinerjanya belum bagus.
- 9) Penambahan kendaraan operasional kantor untuk inspeksi lapangan.
- 10) Penambahan dana serta pengadaan alat pemantauan kualitas udara ambient yang portable, sehingga pada saat kondisi tidak biasa/darurat, seperti kondisi kabut asap, pemantauan dapat dilakukan tanpa mempengaruhi pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Bapedalda Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 ini dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keselarasan antara strategi yang dirumuskan dengan eksekusi strategi dalam pelaksanaan sehingga dapat dijadikan alat pengambil keputusan maupun penetapan kebijakan lebih lanjut.